

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Silvy Theovilia Refialy<sup>1</sup>, Linda Grace Loupatty<sup>2</sup>

<sup>1,2,3)Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Ambon</sup>

Email : silvyrefialy@gmail.com

### ABSTRACT

*This research aims to test and analyze the influence of local revenue, balancing funds and capital expenditure on the financial performance of the Tanimbar Islands Regency regional government. The research was conducted at the Tanimbar Islands Regency Regional Government office in Saumlaki City and the Maluku Provincial Inspectorate office in Ambon City. This research is quantitative research using secondary data in the form of budget realization data for the Regional Government of the Tanimbar Islands Regency, which was obtained from the Secretariat of the Regent of the Tanimbar Islands Regency and the Maluku Provincial Inspectorate. The data analysis method uses the Multiple Linear Regression statistical test. The research results show that local original income has a significant positive influence on the financial performance of the Tanimbar Islands Regency Regional Government. Balancing funds and capital expenditures have an insignificant positive influence on the financial performance of the Tanimbar Islands Regency regional government.*

**Keywords:** regional original income, balancing fund, capital expenditure, regional government financial performance

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian dilakukan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di kota Saumlaki dan kantor Inspektorat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa data realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang diperoleh dari Sekretariat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Inspektorat Provinsi Maluku. Metode analisis data menggunakan uji statistik Regresi Linier Berganda (Multiple Regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dana perimbangan dan belanja modal memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

**Kata kunci :** pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih. Dalam upaya pemerintah daerah mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima.

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Mangowal, 2013). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim & Kusufi, 2012). Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa “dari segi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal”.

Sumawan dan Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketika penerimaan pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam konteks ini, dana perimbangan yang merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya (UU no.33 Tahun 2004).

Rondonuwu dkk. (2015) menyatakan bahwa kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2016:31).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan dipergunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis dan Saputra, 2014).

Kabupaten kepulauan Tanimbar termasuk dalam salah satu daerah otonomi di Indonesia. Sehingga harapkan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus pengelolaan daerahnya sendiri. Bentuk dari tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri dilihat dari laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang juga dilakukan peneliti lainnya seperti yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan

dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung periode 2013 – 2017.

Mahmud, Kawung dan Rompas (2014) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil serta tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara Bisma dan Susanto (2010) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 tidak optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara lain; ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan insfratuktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapulauan Tanimbar**”.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dokumen laporan realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Data sekunder dapat berupa catatan laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, data laporan realisasi anggaran yang telah dipublikasikan yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Jenis data yang di ambil dalam penelitian ini yaitu data realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan sumber data yang di dapatkan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2017-

2022 yang telah tersedia sebagai informasi data tersebut kemudian dikumpulkan dan dikaji. Data tersebut diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran kabupaten Kepulauan Tanimbar di ambil inspektorat daerah Provinsi Maluku dan situs yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Jumlah sampel data sebanyak 6 dan kurang dari 50 sehingga penggunaan uji normalitas untuk mendeteksi kenormalan data yang digunakan adalah dengan teknik Shapiro Wilk. Data dikatakan berdistribusi normal dalam uji shapiro wilk Jika nilai Sig. > 0,05 (Singgih Santoso, 2014).

### Uji Normalitas Shapiro Wilk

Tests of Normality

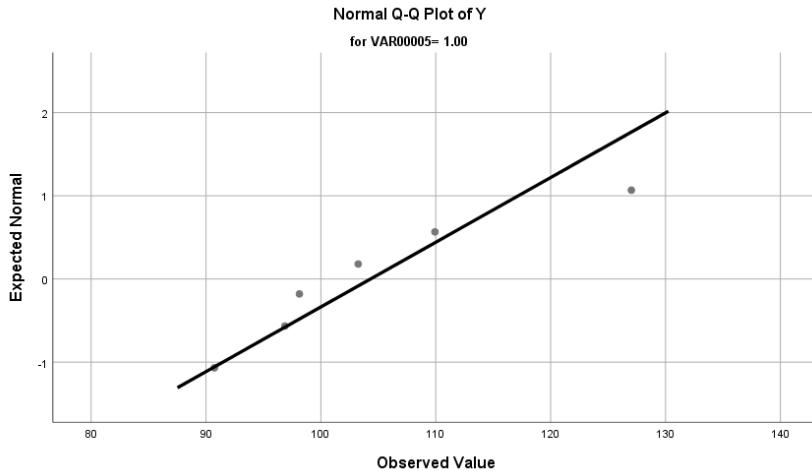
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
X1	.243	6	.200*	.897	6	.354
X2	.179	6	.200*	.933	6	.607
X3	.182	6	.200*	.968	6	.879
Y	.200	6	.200*	.912	6	.448

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan tabel uji normalitas diatas menunjukkan nilai Sig. untuk X1, X2, X3 dan Y berturut-turut 0,354, 0,607, 0,879 dan 0,448 dimana > 0,05. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas shapiro wilk di atas, disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## Heterokedastisitas



**Gambar Scatterplot**

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas dari titik-titik tersebut dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas, yang berarti bahwa tidak ada gangguan yang berarti dalam model regresi ini.

Adapun cara lain untuk menguji apakah dalam model regresi ini memiliki indikasi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan uji Glejser.

## Hasil Uji Gletser

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.025	.034		.734	.539
	X1	-9.557E-5	.000	-.425	-.616	.601
	X2	-1.831E-5	.000	-.388	-.489	.673
	X3	-3.522E-5	.000	-.593	-.800	.508

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Kriteria pengujinya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  berarti terdapat gejala heteroskedasitas.

Berdasarkan tabel hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode gletser variabel X1, X2 dan X2 memiliki nilai signifikansi (Sig)  $> 0,05$ , maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi ini.

### Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
X1	.591	1.692	
X2	.447	2.238	
X3	.513	1.951	

a. Dependent Variable: LGY

Berdasarkan tabel coefficients diatas, dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Data di atas menunjukan bahwa masing-masing variabel independen (X1, X2 dan X3) memiliki nilai tolerance  $> 0,1$  yaitu berturut-turut sebesar 0,591, 0,447 dan 0,513 serta nilai VIF  $< 10$ , yaitu berturut-turut sebesar 1,692, 2,238 dan 1,951. Sehingga pada model regresi linier berganda tidak terdapat gejala multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil analisa model regresi linear berganda dapat dilihat berikut ini :

### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
					Sig.	
1	(Constant)	.974	.113		8.642	.013
	X1	.013	.001	1.007	26.186	.001
	X2	.000	.000	.040	.894	.466
	X3	.000	.000	.029	.709	.552

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah SPSS 25, 2024

Dari tabel dapat ditentukan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,007 X_1 + 0,40 X_2 + 0,29 X_3 + 0,05$$

Dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh adalah variabel pendapatan asli daerah dengan koefisien 1,007. Kemudian diikuti oleh variabel belanja modal dengan koefisien 0,894, sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah yaitu variabel dana perimbangan dengan nilai koefisien sebesar 0,709.

### Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien R<sup>2</sup> yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan varians variabel dependen kurang dari yang diharapkan. Saat menguji R<sup>2</sup>, nilai yang lebih tinggi berarti model yang lebih baik.

### Hasil Uji Koefisien R<sup>2</sup>

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted	R Std. Error of the Estimate
			Square	
1	.999 <sup>a</sup>	.998	.996	.00491

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: LGY

Sumber : Data Diolah SPSS 25, 2024

Dari tabel 4.6 hasil uji R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,998. Hal ini berarti 99,8% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal, sedangkan sisanya yaitu 0,2% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar dalam penelitian ini.

### Uji Statistik t (Persial)

Studi menyimpulkan bahwa tes ini digunakan untuk menentukan apakah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal ini disimpulkan setelah dilakukan penelitian yang melibatkan tes (Ghozali 2018).

## Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.974	.113		8.642	.013
	X1	.013	.001	1.007	26.186	.001
	X2	.000	.000	.040	.894	.466
	X3	.000	.000	.029	.709	.552

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 coefficients di atas, diperoleh t hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 26,186, variabel dana perimbangan sebesar 0,894 dan variabel belanja modal sebesar 0,709. Untuk menentukan t tabel digunakan lampiran statistik tabel t, batas signifikansi yang digunakan 0,05 (5%) dengan (df) n-1= 6-1= 5. Maka diperoleh t tabel 2,015. Maka :

### 1. Variabel Pendapatan Asli Daerah

$H_0$  : Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

$H_1$  : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji t untuk variabel pendapatan asli daerah (X1) diperoleh nilai t hitung 26,186 > t tabel (2,015) dengan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Artinya  $H_1$  diterima. Nilai koefisien regresi positif berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

### 2. Variabel Dana Perimbangan

$H_0$  : Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

$H_2$  : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji t untuk variabel dana perimbangan ( $X_2$ ) diperoleh nilai t hitung  $0,894 < t$  tabel (2,015) dengan signifikansi  $0,466 > 0,05$ . Artinya  $H_2$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi dana perimbangan sebesar  $0,894$  menunjukkan adanya pengaruh positif antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga Dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

### 3. Variabel Belanja Modal

$H_0$  : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

$H_3$  : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji t untuk variabel Belanja modal ( $X_3$ ) diperoleh nilai t hitung  $0,709 < t$  tabel (2,015) dengan signifikansi  $0,552 > 0,05$ . Artinya  $H_3$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi belanja modal sebesar  $0,709$  menunjukkan adanya pengaruh positif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## Pembahasan Penelitian

### Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan tanimbar

Dari hasil uji hipotesis t variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Kepulauan tanimbar. Dimana pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung yang diperoleh dari persamaan regresi yaitu  $26,186$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001$ . Dalam teori keagenan dapat dilihat hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal, pemerintah daerah akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah di berikan oleh masyarakat dalam membuat kebijakan dan mengesakan anggaran demi meningkatkan PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori stakeholder, pemerintah daerah telah mengelola kekayaan daerah seperti pendapatan hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah untuk mengembangkan potensi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Leki et al (2018) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan sejalan juga dengan penelitian Khairudin dan Atmoko (2022) yang membuktikan bahwa PAD berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar**

Dari hasil uji hipotesis t variabel dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dimana dana perimbangan memiliki nilai t hitung yang diperoleh dari persamaan regresi yaitu 0,894 dengan nilai signifikansi sebesar 0,466.

Semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka dapat mencerminkan ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya semakin besar sehingga kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah, sehingga besar kecilnya penerimaan dana perimbangan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen wajib mengurus masyarakat sebagai prinsipal, tugasnya mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui dana perimbangan. Dalam teori stakeholder, dimana pemerintah daerah dapat mengelola transfer dana dari pusat yang diterima daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah pusat sebagai stakeholder dan juga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) yang membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan sejalan juga dengan penelitian Hastuti (2020) yang membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar**

Dari hasil uji hipotesis t variabel belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dimana belanja modal memiliki nilai t hitung yang diperoleh dari persamaan regresi yaitu 0,709 dengan nilai signifikansi sebesar 0,552.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penggunaan anggaran belanja modal pada setiap pemerintah daerah yang tidak diarahkan pada semua kegiatan yang sifatnya

investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang belum dimaksimalkan dengan baik, sehingga hasil yang diberikan dari belanja modal ini belum memberikan nilai yang positif. Sehingga kinerja keuangan daerah yang diharapkan belum tercapai dengan maksimal.

Dalam teori keagenan dimana pemerintah daerah sebagai agen wajib mengurus masyarakat sebagai prinsipal karena belanja modal diarahkan untuk membantu membiayai kegiatan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik yang memadai. Dalam teori stakeholder dimana pemerintah daerah dapat mengelola dana belanja daerah khususnya belanja modal seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja operasional jalan, dan belanja aset lainnya untuk memajukan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholder dan juga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasti Leki (2018) yang membuktikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dan sejalan juga dengan penelitian Yasin dan Kasino (2018) yang membuktikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jjakes.v10i1.1295>
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se jawa barat. Jurnal akuntansi dan ekonomi, 96.
- Bisma, I., D., G., dan H. Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. Jurnal Geneç Swara Edisi Khusus. Vol .4 No. 3: 75-86.
- Darwanis dan Ryanda Saputra. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1 (2), hal.183- 199.
- Halim & Muhammad Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta :Penerbit Salemba Empat.

- dan M. S. Kusufi. 2016. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Leki, Y., Naukoko, A., dan Sumual, J. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. [online] Vol. 18 (05), pp. 164-174. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/21490> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021].
- Machmud, M., G. Kawung, dan W. Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 14 No. 2: 1-13.
- Mangowal, Jessy Christine. (2013). Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. Manado: *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 4: 1386-1396.
- Mardiasmo, (2000), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon., Novi Budiarso. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3 (4): 23-32.
- Sari, N., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
- Sumawan, I.W., dan I.M. Sukarta. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3): 1727-1754.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat